



## BUPATI WONOSOBO

Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
2. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Wonosobo
3. Perwakilan Berbagai Elemen Pemangku Kepentingan

di WONOSOBO

SURAT EDARAN  
NOMOR 000.7/45 TAHUN2026  
TENTANG  
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
TAHUN 2027

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPD disusun melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*) dan memadukan perspektif Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS).

RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan implementasi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dengan tema **“Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan”** guna pencapaian visi **“Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur”**.

RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi, Program

Strategis Nasional (PSN), amanat pembangunan global dan Nasional dan dinamika pembangunan Nasional lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai panduan untuk siklus perencanaan pembangunan tahunan, terlampir disampaikan **Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2027** untuk dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan/sub kegiatan berbasis kinerja dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada prioritas dan sasaran daerah, bermanfaat langsung pada masyarakat, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terpadu lintas sektor, program/proyek strategis Nasional dan Provinsi, serta dengan pendekatan inovatif dan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta berorientasi pada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) yang terukur;
2. Memperhatikan dan mensinergikan upaya penanganan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi dan implementasi Pemerintahan Digital;
3. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis daerah tahun 2027 meliputi :
  - a. Agrobisnis dan Pariwisata yang Berdaya Saing;
  - b. Perekonomian Daerah yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
  - c. Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Adaptif;
  - d. Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur yang Andal Menuju Kabupaten Layak Huni;
  - e. Daya Saing Sumber Daya Manusia;
  - f. Kesejahteraan Masyarakat;
  - g. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Bencana.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 11 Januari 2026  
Bupati Wonosobo



AFIF NURHIDAYAT

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Pertinggal.

Lampiran : Surat Edaran Bupati Wonosobo  
Nomor : 000.7/45/2026  
Tanggal : 11 Januari 2026

## **ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2027 yang berisi prioritas pembangunan, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). RKPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*) dan berorientasi substansi secara Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS).

Secara yuridis formal, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah bersifat *mandatory* dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan diatur lebih rinci dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo untuk periode 2025-2029 dengan tema “**Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan**” guna pencapaian visi “**Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur**”.

Untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan pembangunan Kabupaten Wonosobo, diperlukan dukungan serta kerja sama dari semua pihak yang terlibat, terutama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, Pemerintah Desa, institusi pendidikan tinggi, sektor swasta dan masyarakat luas. Berikut adalah arahan kebijakan dan prioritas pembangunan untuk tahun 2027:

### **I. Rencana Pembangunan**

RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 akan berorientasi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 5,60-5,90%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 72,88; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkisar antara 3,90% – 2,97% dan Angka Kemiskinan antara 13,33 – 12,96%.

## II. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027.

Sejalan dengan arahan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung pencapaian visi **“Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur”** dan identitas daerah **Wonosobo The Soul of Java**, diperlukan sinergi dan harmonisasi berbagai pihak dan sektor, dengan berpedoman pada kebijakan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional tahun 2027;
2. Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Memedomani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Memedomani Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Memedomani RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045;
7. Memedomani RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;
8. Memedomani RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043;
9. Memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) Tahun 2016-2030;
10. Perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan alokasi anggaran yang didasarkan pada program prioritas *“money follow priority program”*, difokuskan pada prioritas dan sasaran pembangunan, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu dan lintas sektor, menyelesaikan isu/permasalahan pembangunan, berorientasi pada keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang terukur;
11. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam perencanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
12. Mempertimbangkan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi lokal, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan di setiap wilayah;
13. Melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah;
14. Meningkatkan skema sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD Kabupaten dengan menjalin kerjasama/ kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, Perguruan Tinggi maupun lembaga/badan guna pencapaian target pembangunan;
15. Meningkatkan partisipasi dan memberikan akses kepada masyarakat dari semua kalangan termasuk kelompok rentan dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan;

16. Pembangunan daerah berlandaskan pada prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), inklusif, non diskriminasi dan berkeadilan.

### **III. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027**

#### **1. Permasalahan Daerah**

##### **1) Belum Optimalnya Daya Saing Sektor Agrobisnis dan Pariwisata**

Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai permasalahan yaitu belum optimalnya daya saing sektor agrobisnis dan pariwisata, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### **a. Sektor Pertanian**

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Wonosobo yang berkontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Akan tetapi masih ada beberapa permasalahan antara lain produksi pertanian yang belum stabil, bahkan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura semakin menurun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 2020-2024, produksi tanaman pangan mengalami penurunan rata-rata sebesar 12,60% per tahun. Produksi tanaman hortikultura sayuran fluktuatif cenderung menurun dengan rata-rata penurunan 2,23% sedangkan produksi hortikultura buah-buahan juga tidak stabil, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan petani.

Belum optimalnya sektor pertanian juga disebabkan masih tingginya *input* produksi, belum berfungsinya kelembagaan ekonomi petani, masih rendahnya praktik budidaya pertanian ramah lingkungan, masih rendahnya riset dan aplikasi teknologi pertanian dan rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian serta masih adanya alih fungsi lahan.

Bukan hanya produksi tanaman pangan dan hortikultura yang mengalami penurunan, tetapi produksi ternak pun fluktuatif cenderung menurun.

Produksi ternak besar dan ternak kecil fluktuatif, cenderung menurun. Penurunan pertumbuhan ternak besar rata-rata sebesar 13,56% per tahun sedangkan pertumbuhan ternak kecil menurun rata-rata sebesar 4,42% per tahun.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya regenerasi petani. Hal ini terlihat dari persentase petani milenial berusia 19-39 tahun hanya sebesar 20,32% sedangkan sisanya sebesar 79,44% berusia 40 tahun keatas.

Penerapan pertanian modern juga masih rendah hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya praktik pertanian dengan teknologi IoT (*Internet of Things*) yaitu berupa budidaya pertanian di *screenhouse* modern. Sampai tahun 2024 baru ada 29 *screenhouse* modern yang

tersebar di 15 kecamatan. Jumlah ini masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Masalah alih fungsi lahan sawah juga perlu diatasi, karena berdampak bagi ketahanan pangan dan lingkungan. Luas lahan yang tersedia akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi pertanian. Laju alih fungsi lahan sawah menjadi lahan nonsawah rata-rata sebesar 3,38% per tahun. Lahan sawah baik irigasi maupun tadah hujan yang merupakan lahan penghasil tanaman pangan terutama padi, berubah fungsinya menjadi lahan pertanian bukan sawah maupun lahan peruntukan lainnya. Berkurangnya lahan sawah ini akan berpengaruh terhadap produksi padi.

Kurang optimalnya lahan sawah juga disebabkan tidak mendukungnya infrastruktur irigasi. Jaringan irigasi sepanjang 472,972 m atau sekitar 62,76% jaringan irigasi tersier nonpermanen di Kabupaten Wonosobo masih perlu dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman. Upaya ini juga dilakukan sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan.

#### **b. Sektor Industri Pengolahan**

Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya nilai tambah produk dan kapasitas produksi terutama dari Industri Kecil dan Menengah (IKM), akses pasar yang masih terbatas, lemahnya kapasitas dan kompetensi pelaku usaha kecil dan menengah, masih minimnya kemitraan usaha, masih minimnya digitalisasi, serta masih perlunya pembiayaan/ modal terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

#### **c. Sektor Perdagangan**

Pada tahun 2024 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB turun sebesar 1,74% dibanding tahun 2023. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2024 mengalami penurunan 1,11% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Hal tersebut dipengaruhi permasalahan, antara lain masih panjangnya rantai distribusi, rendahnya akses pemasaran produk unggulan daerah di pasar modern, belum optimalnya ekspor produk daerah yaitu rata-rata hanya sebesar 31.708.414 (USD) dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan fluktuatifnya harga kelompok kebutuhan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah juga belum menjadi bagian dari rantai pasok, sehingga akses pasar terbatas cenderung berjalan sendiri tidak mempunyai *offtaker* (pembeli tetap) sehingga sangat rentan terhadap gejolak pasar.

#### **d. Sektor Pariwisata**

Walaupun Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit karena keindahannya, namun masih dihadapkan beberapa masalah.

Tahun 2024, laju pertumbuhan sektor pariwisata mengalami penurunan 5,81% jika dibanding dengan laju pertumbuhannya pada tahun 2023.

Kondisi ini dipahami sebagai dampak dari dinamika eksternal, seperti perubahan pola perjalanan wisata dan meningkatnya persaingan antar destinasi, serta faktor internal yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan pariwisata.

penurunan laju pertumbuhan pariwisata juga mencerminkan tingginya ketergantungan pada destinasi unggulan tertentu, khususnya kawasan Dataran Tinggi Dieng. Ketika terjadi tekanan terhadap daya dukung lingkungan, kondisi cuaca ekstrem, atau kejenuhan destinasi, kinerja pariwisata daerah secara keseluruhan ikut terpengaruh. Hal ini menunjukkan pentingnya diversifikasi destinasi dan penguatan produk wisata alternatif di wilayah lain.

#### **e. Pangan**

Masalah ketahanan pangan di Kabupaten Wonosobo masih perlu mendapat perhatian, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo yang masih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Pangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga atau masyarakat tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutu dan aman untuk dikonsumsi. Guna mewujudkan ketahanan pangan diperlukan kemandirian pangan, yaitu kemampuan menyediakan pangan dari produksi sendiri atau secara mandiri.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU / *Prevalence of Undernourishment*) Kabupaten Wonosobo juga masih tinggi. Jika dibandingkan dengan rata-rata PoU Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,63%, persentase penduduk yang tidak mendapatkan konsumsi pangan yang cukup di Kabupaten Wonosobo masih lebih tinggi yaitu sebesar 13,39%.

Dalam rangka menuju Wonosobo mandiri pangan, masih ada beberapa permasalahan yang harus diatasi antara lain masih kurangnya pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman; masih minimnya diversifikasi dan pengolahan lanjutan produk pangan lokal; masih panjangnya rantai distribusi produk pangan; masih terbatasnya jaminan kualitas produk pangan; belum adanya penelitian tentang pangan; masih rendahnya inovasi teknologi pangan; serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

### **2) Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

Kesejahteraan sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dimana jika perekonomian daerah tumbuh maka akan berdampak terhadap kenaikan pendapatan masyarakat. Kesejahteraan ekonomi yang diukur dengan PDRB per kapita memberikan gambaran ketika PDRB per kapita tinggi maka pendapatan penduduk juga tinggi. Dengan pendapatan

yang lebih tinggi, masyarakat memiliki daya beli yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dimana distribusi pendapatan antarkelompok di Kabupaten Wonosobo masih dalam kategori ketimpangan sedang. Distribusi pendapatan yang hanya terkonsentrasi pada kelompok pendapatan tinggi menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat secara umum.

Penduduk Kabupaten Wonosobo belum cukup produktif, yang ditunjukkan dari nilai rata-rata PDRB per kapita pada tahun 2024 sebesar dalam Rp27,19 juta per tahun. Angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah (Rp47,97 juta per tahun) dan PDRB per kapita nasional (Rp78,62 juta per tahun). Tingginya *gap* PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo terhadap rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan, ketrampilan dan penguasaan teknologi sehingga produktivitasnya tidak optimal.

Inflasi kurun waktu 2020-2024 berfluktuasi dan mengalami inflasi tertinggi pada tahun 2022 akibat kenaikan harga energi dan cuaca ekstrem (*el nino* dan *la nina*) menjadi salah satu penyebab beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga. Andil inflasi Kabupaten Wonosobo banyak dipengaruhi oleh kenaikan pada harga kelompok makanan dan minuman terutama komoditas beras, cabai merah, cabai rawit dan gula pasir. Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan primernya.

Masih rendahnya investasi di Kabupaten Wonosobo ditunjukkan rendahnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai investasi pada tahun 2023 sebesar Rp257.592.100.000 yang berakibat pada rendahnya serapan tenaga kerja, masih sedikitnya jumlah kemitraan/ kerja sama investasi (7 kerja sama/ kemitraan), masih kurangnya sosialisasi dan promosi investasi, masih rendahnya ketersediaan data peluang/ potensi investasi yang siap ditawarkan kepada investor serta belum adanya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan investasi. Daya tarik investasi ke daerah masih belum tinggi, artinya diperlukan upaya untuk menciptakan kondisi yang mendorong investor untuk berinvestasi di Kabupaten Wonosobo, dengan memaksimalkan potensi ekonomi, sumber daya alam, kebijakan pemerintah, kondisi sosial budaya dan infrastruktur pendukung.

### **3) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dinilai dari implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kualitas dan profesionalisme aparatur, penyediaan pelayanan publik dan kemandirian daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PAN RB pada tahun 2024 capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada tahun 2024 meningkat dari 66,93 (kategori B) menjadi 85,39 (kategori A). Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan, namun nilainya masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 91,11 dan masih terdapat beberapa kelemahan terutama pada implementasi RB General terutama pada strategi pelaksanaan dan capaian pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan predikat B (Baik) dengan nilai 67,04. Angka ini meningkat sedikit dibandingkan capaian nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 66,94 dengan predikat yang sama namun capaian ini masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 82,63. Masih rendahnya peningkatan nilai SAKIP antar tahun dipengaruhi masih rendahnya komponen pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sistem merit dalam pengembangan kompetensi pegawai, baik melalui metode klasikal maupun nonklasikal, merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur. Implementasi pengelolaan kinerja pegawai yang berlandaskan pada nilai merit bertujuan untuk menciptakan evaluasi kinerja yang lebih objektif dan transparan. Capaian Nilai Sistem Merit Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 sebesar 289,5 ini masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 340,5.

Terkait dengan peningkatan dan pengembangan kompetensi maka pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi penting guna memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui penerapan sistem merit yang efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif dan kompetitif, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terutama di era digital dan pelayanan dituntut cepat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mendorong kebijakan pengembangan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian indeks SPBE di Kabupaten Wonosobo pada 2024 ini mengalami peningkatan dari 3,54 (2023) dengan status "Sangat Baik" menjadi 3,79 dengan status "Sangat Baik". Namun penerapan SPBE di Kabupaten Wonosobo masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah di tahun 2024 yaitu sebesar 4,42 dan masih memerlukan perbaikan terutama pada Domain Kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen SPBE.

Apabila dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2024 sebesar 15%. Rasio kemandirian daerah diukur dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan

daerah. Rasio kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal pemerintah pusat dan provinsi semakin berkurang. Berdasarkan hasil tersebut kemampuan keuangan Kabupaten Wonosobo masih rendah untuk membiayai pengeluaran pembangunan, sumber pendapatan masih tergantung pada biaya transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

#### **4) Belum Optimalnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Ketersediaan infrastruktur wilayah berperan penting dalam mendukung penguatan fondasi layanan infrastruktur untuk pencapaian pusat agrobisnis dan pariwisata. Infrastruktur wilayah dalam hal ini terutama yang berada pada sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman. Infrastruktur ini di antaranya jalan, irigasi, drainase, air minum, sanitasi (air limbah domestik), perhubungan serta perumahan dan kawasan permukiman.

Kondisi jalan menjadi sorotan utama dalam layanan kinerja infrastruktur. Anggapan masih banyaknya jalan rusak di Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Wonosobo. Kondisi infrastruktur jalan sebagai layanan aksesibilitas dapat dilihat dari kinerja tingkat kemantapan jalan. Kondisi jalan mantap yang rendah masih menjadi permasalahan signifikan yang menjadi kendala perkembangan pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2024, kemantapan jalan di Kabupaten Wonosobo sebesar 65,93% dengan rincian kondisi baik baru mencapai 33,22%. Pencapaian kinerja tahun 2024 dipengaruhi oleh pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan yang intensif sehingga menjaga kondisi jalan tetap stabil, serta adanya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih selektif dengan memperhatikan tingkat kerusakan yang ada dan arahan prioritas kawasan yang perlu diintervensi. Oleh karena itu, meskipun anggaran untuk penyelenggaraan jalan berkurang pada tahun 2024, kinerja kemantapan jalan tetap dapat ditingkatkan.

Jika dibandingkan dengan jalan nasional dan jalan provinsi, capaian kemantapan jalan di Kabupaten Wonosobo masih jauh di bawah capaian kemantapan jalan nasional dan jalan provinsi yang sudah mencapai di atas 90%. Namun demikian, jika dibandingkan capaian rata-rata jalan kabupaten mantap secara nasional yang baru mencapai 53%, kondisi Kabupaten Wonosobo masih di atas capaian rata-rata kemantapan jalan kabupaten secara nasional. Demikian pula dengan kabupaten tetangga dalam satu Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar yaitu Kabupaten Banjarnegara, tingkat kemantapan jalan Kabupaten Wonosobo masih di bawah capaian Kabupaten Banjarnegara (75,83%).

Dalam rangka mendukung konektivitas wilayah, infrastruktur jalan perlu dilengkapi sarana dan prasarana kelengkapan jalan untuk mewujudkan jalan berkeselamatan. Ketersediaan infrastruktur jalan berkeselamatan di Kabupaten Wonosobo juga masih menjadi masalah yang signifikan. Hal ini karena dari 273 ruas jalan kabupaten Wonosobo belum ada yang memiliki kelengkapan jalan sesuai standar 60%. Sebagian besar ruas jalan masih minim kelengkapan jalannya. Kelengkapan jalan diantaranya berupa alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, marka jalan, *guardrail* dan cermin tikungan perlu disediakan dalam rangka meningkatkan keselamatan jalan. Selanjutnya dari sisi keselamatan jalan secara komposit, capaian indeks keselamatan jalan Kabupaten Wonosobo mencapai 72%. Capaian ini didukung diantaranya oleh peningkatan ruas jalan yang dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan, angkutan umum yang laik jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelaksanaan pelayanan uji berkala kendaraan. Namun demikian, di satu sisi masih ada tantangan pada penataan parkir terutama di kawasan perkotaan dan destinasi pariwisata yang berada di koridor jalan utama seperti pada koridor jalan akses Dieng dan destinasi lainnya. Untuk layanan moda transportasi, juga masih terdapat tantangan terkait belum optimalnya layanan angkutan umum yang masih perlu ditingkatkan. Tantangan lain, terkait pengembangan wilayah, sebagian besar jalur trayek angkutan umum memiliki titik tujuan simpul transportasi di pusat kota Wonosobo (ibu kota kabupaten) yang menjadikan beban kota menjadi sangat besar, namun belum semua trayek aktif beroperasi.

Tahun 2024 trayek angkutan umum yang menjadi kewenangan kabupaten dan masuk kategori aktif di Kabupaten Wonosobo sebanyak 21 trayek. Trayek tersebut didukung Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Jurusan Wonosobo-Prembun, Wonosobo-Purworejo, Wonosobo-Magelang dan Wonosobo-Purwokerto. Minimnya trayek aktif ini menjadi salah satu penyumbang Anak Tidak Sekolah (ATS) karena tidak adanya transportasi angkutan umum yang melayani mereka menuju ke sekolah. Tahun 2025 sebanyak 55,09% (146 desa/kelurahan dengan jumlah ATS 2.783 anak) desa/kelurahan tempat tinggal ATS tidak dilayani oleh trayek angkutan umum. Serta sisanya 44,91% atau 119 desa/kelurahan dijangkau oleh angkutan umum dengan total ATS pada wilayah ini 2.391 anak.

Terkait dengan pelayanan angkutan umum, Kabupaten Wonosobo secara regional hingga tahun 2025, belum terdapat layanan Trans Jateng (angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan regional (lintas kabupaten dalam provinsi)). Hal ini karena pola aglomerasi regional perkotaan antar kabupaten belum terbentuk secara masif, bangkitan serta tarikan penumpangnya belum terlalu kuat. Untuk layanan angkutan umum di dalam wilayah Kabupaten Wonosobo pun belum memadai. Kabupaten Wonosobo terdapat 36 trayek dengan 21 trayek aktif, 5 trayek tidak beroperasi dan 10 trayek tidak terdapat operator.

Kondisi angkutan umum yang sepi penumpang ini juga diindikasikan dari hasil survei statis pada Tahun 2024, rata-rata *load factor* penumpang hanya mencapai 21% dari 21 trayek aktif yang menjadi kewenangan kabupaten. *Load factor* dalam konteks angkutan merujuk pada perbandingan antara kapasitas kursi penumpang yang digunakan dengan kapasitas kursi penumpang yang tersedia. *Load factor* yang rendah ini menunjukkan adanya ruang kosong yang mungkin dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional.

Rendahnya rata-rata *load factor* ini disebabkan karena minat penduduk untuk menggunakan moda transportasi umum semakin berkurang. Berkurangnya minat diindikasikan karena kondisi kualitas angkutan umum yang kurang memadai, terbatasnya halte dan terminal yang representatif dan ketidakpastian jadwal operasi, serta dipengaruhi kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi baik itu roda dua maupun roda empat. Peningkatan volume kendaraan pribadi juga berimplikasi pada kemacetan pada titik-titik dan saat tertentu terutama di pusat kota serta tata parkir yang belum memadai. Oleh karena itu, masih diperlukan peningkatan upaya pemerintah kabupaten untuk menyediakan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, tidak hanya melayani kawasan perkotaan tapi juga perdesaan serta penataan parkir. Implementasi angkutan massal perkotaan dan perdesaan nantinya juga akan mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi.

Kabupaten Wonosobo juga masih memiliki permasalahan terkait tata kota yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi parkir yang belum tertata dengan capaian realisasi 37,50% pada Tahun 2024. Tata kota di perkotaan Wonosobo masih diperlukan kedepannya sebagai upaya penataan wajah kota baik itu di ibukota Kabupaten maupun di kawasan perkotaan lainnya untuk menuju kabupaten layak huni.

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan aksesibilitas antar sektor tak kecuali sebagai penghubung destinasi wisata maupun distribusi hasil pertanian (agrobisnis) yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Jaringan irigasi menjadi infrastruktur pendukung visi agrobisnis. Ketersediaan layanan irigasi di Kabupaten Wonosobo juga belum optimal. Capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 63,44% dalam kategori kurang, maka diperlukan penanganan operasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan. Irigasi dalam kondisi baik menjadi faktor utama penentu kinerja sistem irigasi yang diwujudkan dalam indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Nilai IKSI Kabupaten Wonosobo tahun 2024 sebesar 64,71%. Jika dibandingkan dengan capaian IKSI Provinsi Jawa Tengah, nilai IKSI Kabupaten Wonosobo masih di bawah IKSI Provinsi Jawa Tengah yang sudah mencapai 69,11%.

Infrastruktur layanan dasar yang menjadi permasalahan yaitu sanitasi. capaian akses sanitasi layak (dalam hal sistem pengelolaan air limbah

domestik/SPALD), kinerja Tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo masih sangat rendah, yaitu baru mencapai 75,49% (berada level bawah di antara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah). Capaian akses sanitasi layak dalam satu Wilayah Pengembangan Wonobanjar, capaian Kabupaten Wonosobo masih tertinggal dari Kabupaten Banjarnegara yang sudah mencapai 85,12%. Hal ini menunjukkan Kabupaten Wonosobo menghadapi tantangan yang besar dalam meningkatkan akses sanitasi layak. Kondisi geografis Wonosobo yang berbukit dan bergunung menjadi kendala dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi. Di samping itu, pemahaman dan perilaku yang kurang terhadap sanitasi ikut berperan dalam rendahnya capaian akses sanitasi di Kabupaten Wonosobo. Sanitasi masih menjadi perhatian di Kabupaten Wonosobo. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik yang layak masih belum dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan ini harus diatasi karena pentingnya sanitasi bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kondisi Akses sanitasi aman di Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kategori rendah walaupun Kabupaten Wonosobo sudah memiliki Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Akses sanitasi aman pada tahun 2024 sebesar 2%. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan target nasional 15%. Kondisi capaian sanitasi aman di Kabupaten Wonosobo yang masih rendah mengindikasikan bahwa sanitasi di Wonosobo belum memiliki prioritas yang besar dalam penanganannya.

Air minum yang juga menjadi bagian dari infrastruktur dasar khususnya air minum aman masih belum maksimal capaiannya. Cakupan akses air minum layak pada tahun 2024 sebesar 94,04% tetapi untuk akses aman masih 17,91%. Angka capaian air minum aman saat ini baru dipenuhi oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Aji. Di sisi lain, terdapat sistem penyediaan air minum perdesaan yang dikelola oleh Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) yang harus diperhatikan juga terkait kualitas air minumnya. Uji kualitas air secara berkala harus dilakukan oleh seluruh pihak yang menyediakan air minum kepada masyarakat.

Kondisi rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Wonosobo tahun 2024 masih rendah yakni 52,19% jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 71,76% dan termasuk dalam 2 (dua) kabupaten terbawah yang memiliki capaian rendah di Jawa Tengah. Ketersediaan akses air minum layak, sanitasi layak, ketahanan bangunan, serta kecukupan luas tempat tinggal perlu diperhatikan sebagai indikator untuk mewujudkan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak adalah yang memenuhi seluruh indikatornya. Kabupaten Wonosobo masih memiliki kewajiban untuk memenuhi hunian layaknya sebesar 47,81%. Kurangnya pengelolaan rumah tangga dengan akses hunian layak ini memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan sekitar.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 663/563/2021 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo tahun 2021 memiliki luas 819,99 Ha. Sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 63,96% permukiman kumuh yang belum tertangani. Salah satu aspek dari kekumuhan adalah ketidakteraturan bangunan gedung. Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) didasarkan pada rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Wonosobo sehingga saat ini pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan untuk mencegah kawasan kumuh tersebut semakin meluas. Tidak hanya berada di kawasan kumuh, permukiman yang berada di Kabupaten Wonosobo juga memiliki potensi terdampak bencana. Berdasarkan kajian risiko bencana tahun 2023-2028 Kabupaten Wonosobo memiliki 8 (delapan) potensi bencana atau dapat disebut dengan bahaya. Meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi, tanah longsor dan gempabumi. Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi terutama untuk banjir di Kecamatan Wonosobo, banjir bandang di Kecamatan Kejajar, kebakaran hutan dan lahan di Lereng Gunung Sindoro dan Sumbing, kekeringan di Kecamatan Wadaslintang dan tanah longsor di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

Kejadian banjir limpasan permukaan sering terjadi di Kabupaten Wonosobo saat musim penghujan. Banjir limpasan yang terjadi di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan karena kondisi drainase yang tidak baik sehingga air hujan akan terkumpul atau menggenang dan melewati jalan. Akibat dari genangan yang terkumpul akan merusak lapisan aspal jalan dan akan membahayakan bagi pengguna jalan. Tahun 2023 terdapat 55 titik genangan air akibat banjir limpasan dan terdapat 2 (dua) titik genangan yang sudah diperbaiki (ketercapaian penanganan 3,6%).

Bertambahnya permukiman juga menjadi faktor terjadinya banjir limpasan. Selain itu, permukiman baru yang tidak tertata menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan penataan lingkungan permukiman dan menambah luasan permukiman kumuh. Potensi bahaya lain yang ditimbulkan adalah kebakaran rumah di permukiman penduduk. Tahun 2024 *response time* terhadap kejadian kebakaran sebesar 23,94 menit. Waktu ini belum mencapai target *response time* 15 menit untuk pemadam kebakaran. Permasalahan ini muncul karena armada pemadam kebakaran berada terpusat di ibukota Kabupaten Wonosobo serta dengan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki. Selain itu letak wilayah jangkauan yang cukup luas serta kondisi topografi wilayah yang menyebabkan masih lamanya *response time* pemadam kebakaran.

##### **5) Belum Optimalnya Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Wonosobo tidak hanya terbatas pada angka makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi juga komponen pendukung kenaikan IPM itu sendiri seperti

sektor pendidikan, kesehatan, daya saing pemuda sebagai penyumbang tenaga kerja usia produktif, dan kesetaraan gender. Sektor pendidikan menghadapi hambatan serius dalam hal ketuntasan wajib belajar 13 tahun dengan rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Wonosobo pada tahun 2025 berada pada angka 6,91 tahun, yang mengindikasikan mayoritas penduduk usia dewasa hanya menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Menengah Pertama demikian pula dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang baru mencapai 12,05 tahun. Harapan lama sekolah ini dipengaruhi oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada rentang usia 7-12 tahun telah mencapai hampir 100% namun terdapat penurunan signifikan pada jenjang usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Data menunjukkan adanya fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kendala ekonomi keluarga, akses geografis menuju sekolah menengah yang sulit di beberapa kecamatan, tidak tersedianya sarana transportasi menuju sekolah hingga kurangnya edukasi untuk peningkatan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Selain masalah kuantitas, kualitas output pendidikan juga menjadi permasalahan. Capaian literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP masih fluktuatif dan memerlukan penguatan pada kapasitas tenaga pendidik serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Distribusi kualitas guru yang belum merata antarwilayah menyebabkan sekolah-sekolah di wilayah tertentu kekurangan tenaga pengajar berkualitas dibandingkan sekolah di pusat kota. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan dari PAUD sampai sekolah menengah, masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Selain pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar, permasalahan sekolah pada lokasi rawan bencana belum sepenuhnya terselesaikan terkait dengan perbaikan pasca bencana ataupun terkait struktur bangunan sekolah pada lokasi bencana.

Di sektor kesehatan, permasalahan utama berpusat pada status gizi masyarakat dan beban penyakit dan kematian ibu dan bayi. Prevalensi stunting di Wonosobo, meskipun mengalami tren penurunan, namun masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan karena berkaitan erat dengan kualitas SDM di masa depan. Penyebab stunting bersifat multidimensi, mencakup kurangnya akses air minum layak, sanitasi yang belum memenuhi syarat kesehatan, serta pola pengasuhan bayi dan balita yang belum optimal, rendahnya literasi gizi pada remaja putri, calon pengantin dan pasangan usia subur Masalah kesehatan lainnya adalah tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS, yang seringkali disertai dengan stigma sosial sehingga menghambat proses penemuan kasus dan pengobatan secara tuntas serta beban penyakit degeneratif akibat pola hidup dan perubahan lingkungan seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi dan kanker. Permasalahan kematian ibu dan bayi masih terjadi di Kabupaten Wonosobo bahkan angka kematian bayi cenderung naik setiap tahun.

Beberapa penyebab kematian terkait dengan kasus penyakit penyerta, gizi kronis, dan faktor terlambat.

Keterlibatan pemuda dalam pembangunan juga masih terbatas, yang tercermin dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang perlu ditingkatkan, terutama pada aspek lapangan kerja. Daya saing tenaga kerja terutama pada kelompok pemuda masih belum optimal karena sebagian besar angkatan kerja di Wonosobo bekerja di sektor informal dengan tingkat pendidikan rendah yang berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas.

Permasalahan gender dan perlindungan anak juga menjadi bagian tak terpisahkan pembangunan SDM. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya praktik pernikahan di bawah usia 19 tahun, berdampak langsung pada terhambatnya pengembangan potensi individu secara maksimal. Pernikahan usia anak di Wonosobo berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah dan risiko kesehatan bagi ibu muda, yang pada akhirnya menciptakan siklus kemiskinan dan rendahnya kualitas SDM.

#### **6) Masih Tingginya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan**

Angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2025 telah turun dibandingkan tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar 13,34% atau turun, 1,96 dibandingkan tahun 2024. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 106.290 jiwa yang berada jauh dari posisi garis kemiskinan. Dengan garis kemiskinan sebesar 486.105, pengeluaran per kapita penduduk miskin masih jauh dari angka ini yang ditunjukkan dengan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 2,25 dan keparahan kemiskinan 0,54.

Ketimpangan pendapatan juga menjadi masalah yang serius, tercermin dari Rasio Gini yang stabil di angka 0,34. Pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal dan belum sepenuhnya memberikan efek bagi masyarakat miskin. Maka diperlukan upaya lebih dalam transformasi ekonomi menuju hilirisasi pertanian dan pariwisata memastikan masyarakat miskin juga mendapatkan manfaat dari pembangunan agar keuntungan ekonomi tidak hanya mengalir keluar daerah atau ke kelompok menengah ke atas.

Masalah akurasi data sasaran penanggulangan kemiskinan juga masih menjadi kendala operasional. Adanya kesalahan dalam penetapan sasaran, baik penduduk miskin yang tidak terdata (*exclusion error*) maupun penduduk tidak miskin yang menerima bantuan (*inclusion error*), menyebabkan inefisiensi penganggaran pembangunan.

#### **7) Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Gambaran kondisi kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator IKLH. Capaian IKLH Kabupaten Wonosobo tahun 2024 mencapai nilai 71,11 (angka nonkonversi). Angka ini sudah melampaui capaian Provinsi Jawa Tengah yang telah mencapai 69,46 dan juga masih di bawah capaian

IKLH nasional sebesar 73,07 di tahun 2024. Komponen parameter yang menyebabkan capaian IKLH belum optimal yaitu rendahnya kualitas air (51,15). Indeks Kualitas Air (IKA) yang masuk kategori “sedang” dan tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh zat pencemar yang ada di dalam tubuh air. Berdasarkan data pemantauan kualitas air, salah satu parameter yang berada di atas ambang batas yaitu *fecal coliform* dan total *coliform*. Parameter ini ditemukan jika badan air terkontaminasi limbah kotoran hewan dan/atau manusia. Limbah kotoran hewan diindikasikan dari kegiatan peternakan yang belum dilengkapi IPAL, atau dari residu penggunaan pupuk *Chicken Manure* (CM) pada budidaya pertanian hortikultura yang terbawa aliran air. Kontaminasi dari limbah manusia berasal dari pembuangan saluran air limbah domestik yang tidak dilengkapi septictank/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Secara umum, kondisi sungai juga diperburuk dengan pembuangan sampah padat dan cair pada badan sungai. Hal ini juga menjadikan belum optimalnya kualitas air karena salah satunya tercemar dengan adanya sampah. Sampah yang tidak dikelola akan mengancam tubuh air (sampah anorganik yang terbawa aliran sungai), bahkan air lindi (cairan hasil dari percampuran air hujan dengan sampah di tempat pembuangan akhir) akan mencemari tubuh air.

Jika dilihat dari sisi kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah RTRW sudah mencapai 84,13% (catatan: analisis spasial masih menggunakan peta digital Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2011). Nilai ini memiliki arti bahwa terdapat 15,87% lahan tidak sesuai dengan tata ruang atau tidak sesuai peruntukannya. Hal ini karena belum optimalnya penegakan tata ruang serta belum tersedianya regulasi rencana tata ruang dalam skala detail yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pengaruh ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang dapat berpengaruh terhadap kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan hidup (udara, air dan degradasi lahan), ancaman bencana alam dan keanekaragaman hayati.

Di samping itu, kurangnya tutupan vegetasi dan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah untuk budidaya pertanian dan lainnya yang tidak ramah lingkungan juga menyebabkan peningkatan erosi dan sedimentasi. Ancaman degradasi lahan dapat terjadi akibat pengaruh pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Degradasi lahan ini berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup baik itu di wilayah Kabupaten Wonosobo maupun di wilayah tetangga yang berada di bawahnya, mengingat posisi ekologis Kabupaten Wonosobo sebagai daerah hulu aliran sungai. Erosi lahan pertanian terutama di kawasan atas, pada saat musim hujan terbawa oleh aliran sungai ke bawah dan terendapkan menjadi sedimen di waduk yang berada di Kabupaten Wonosobo maupun di kabupaten tetangga.

Peningkatan erosi dan sedimentasi terutama dari hulu DAS Serayu yang berada di segmen Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari volume sedimen

yang masuk ke Waduk Mrica Banjarnegara. Tingkat sedimentasi di Waduk Mrica telah menjadi isu nasional karena merupakan objek vital nasional pembangkit listrik dan pengendali banjir di DAS Serayu. Penyebab tingginya sedimentasi dipengaruhi juga oleh degradasi lingkungan daerah tangkapan air/hulu DAS baik yang berada di Kabupaten Wonosobo maupun Kabupaten Banjarnegara. Pada Oktober Tahun 2024 volume total sedimen yang masuk Waduk Mrica sebesar 7.693.789,92 m<sup>3</sup>/tahun. Total sedimen ini disumbangkan oleh beberapa sungai besar di DAS Serayu hulu yaitu Sungai Merawu, Sungai Lumajang, Sungai Liangan (alirannya berasal dari Kabupaten Banjarnegara) dan Sungai Serayu (alirannya berasal dari Kabupaten Wonosobo). Kontribusi Sedimen Sungai Serayu masuk Waduk Mrica pada tahun 2024 sebesar 3.632.406,31 m<sup>3</sup>/tahun (47,21%). Untuk tingkat erosi dan sedimentasi di luar DAS Serayu terindikasi belum separah dengan kondisi hulu DAS Serayu, namun demikian tetap menjadi upaya konservasi di DAS lainnya.

Dari sisi pengelolaan sumber daya air, rendahnya kualitas tutupan vegetasi juga akan meningkatkan potensi banjir limpasan sungai dan berkurangnya debit mata air. Banjir limpasan sungai Serayu pernah mencapai 2.295 m<sup>3</sup>/detik (Data Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Balai Serayu Citanduy). Sungai-sungai di Kabupaten Wonosobo termasuk dalam Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto (WS SB). Secara kewenangan masuk pada Wilayah Sungai Strategis Nasional Serayu Opak di bawah kendali Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Kementerian PUPR. Namun demikian, karena berada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan berdampak juga di kawasan permukiman maupun kawasan lainnya, perlu ada peran dari pemerintah kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk upaya konservasi sumber daya air.

Bentuk lahan Wonosobo didominasi daerah gunungapi dan menjadi bagian dari Cekungan Air Tanah (CAT) Wonosobo. Kondisi ini menjadikan wilayah Wonosobo dianugerahi banyaknya mata air yang digunakan sebagai air baku untuk kebutuhan domestik air minum dan lainnya. Pada tahun 2024, terdapat 12,02% mata air yang kondisinya mengalami kerusakan/menurun debitnya (dari total jumlah mata air yang terdata). Kerusakan mata air diindikasikan oleh kondisi daerah tangkapan air/imbunan air/resapan air dan sempadan mata air. Hal ini juga dipengaruhi oleh kualitas tutupan lahan.

Belum optimalnya pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan penting di Kabupaten Wonosobo. Kinerja pengelolaan persampahan mengalami fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Terdapat peningkatan capaian meskipun belum terlalu signifikan. Berdasarkan SE Menteri LH No. S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Des 2024, Kabupaten/Kota yang Tempat Pemrosesan Akhirnya (TPA) mendapatkan pengawasan/pembinaan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena masih menggunakan sistem open dumping maka capaian penanganan

sampah di TPA Kabupaten Wonosobo dianggap 0 ton/tahun. Sehingga berdasarkan perhitungan, capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo tahun 2024 menjadi sebesar 15,27%. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di tingkat desa dan regional wilayah pengembangan menjadi hambatan dalam pengelolaan persampahan secara sistemik dari hulu ke hilir. Pengelolaan persampahan meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Hingga tahun 2024 Kabupaten Wonosobo baru memiliki 27 TPS 3R (10,18% dari jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Wonosobo), dengan kondisi ini timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah baru mencapai 15,10% atau sebanyak 20.057,73 ton dan timbulan sampah yang belum terolah sebesar 132.810,96 ton (84,9%).

Selain itu, fenomena perubahan iklim secara global juga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Wonosobo. Perubahan iklim akan berdampak pada perubahan masa tanam pertanian, munculnya embun upas, perubahan suhu. Dampak perubahan iklim Wonosobo terutama pada kawasan yang rawan longsor akan meningkatkan potensi terjadinya bencana longsor dan banjir limpasan. Pada sisi pertanian, dampak perubahan iklim diindikasikan akan merusak tata waktu tanam sehingga terjadi ketidakpastian musim tanam, meningkatnya serangan hama, penyakit dan kekeringan yang dapat mengakibatkan gagal panen. Munculnya embun upas juga dapat merusak tanaman. Di sisi lain, fenomena embun upas khususnya di Kawasan Dieng menarik minat wisatawan untuk merasakan sensasi udara dingin di bawah 0°C (nol derajat Celsius) sehingga terbentuk es/embun upas. Aspek perubahan iklim dapat dilihat dari data emisi Gas Rumah Kaca (GRK)/emisi karbon. Pada tahun 2024 total emisi karbon yang dihasilkan di Kabupaten Wonosobo 381,21 giga ton CO<sub>2</sub> (data SIGN SMART KLHK, 2025). Data emisi didasarkan pada perhitungan emisi GRK pada sektor pertanian, kehutanan, energi, *Industrial Process and Product Use* (IPPU) dan limbah. Emisi GRK ini perlu diturunkan dengan berbagai upaya penurunan emisi GRK untuk mendukung target *zero emission* secara global dan nasional. Berdasarkan aksi yang terhimpun pada aplikasi AKSARA BAPPENAS, aksi di Kabupaten Wonosobo secara kumulatif Tahun 2025 baru mencapai penurunan sebesar 290.572,09 Ton CO<sub>2</sub> eq dengan 83 kegiatan aksi. Namun demikian, data masih bersifat dinamis karena masih banyak aksi-aksi kegiatan inti maupun pendukung dari para pemangku kepentingan yang belum dilaporkan di aplikasi AKSARA.

Perubahan iklim serta perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang dapat berdampak kepada intensitas kejadian bencana alam. Bencana alam yang ada di Kabupaten Wonosobo didominasi karena pengaruh hidrometeorologi (akibat perubahan iklim global) dan pengaruh perubahan penggunaan lahan. Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Wonosobo seperti cuaca ekstrem (angin kencang/puting beliung,

kekeringan, hujan dengan intensitas tinggi), banjir bandang dan tanah longsor. Kejadian bencana sejak tahun 2020-2025 tercatat jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Wonosobo mencapai 1.523 kejadian bencana alam yang didominasi bencana longsor.

Upaya penanggulangan bencana, diarahkan untuk pengurangan risiko bencana. Kondisi ini dicerminkan dengan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2024 sebesar 67,98 (sedang) yang semakin menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka IRB semakin menurun maka risiko semakin kecil (baik). Nilai IRB Kabupaten Wonosobo lebih baik dibandingkan dengan nilai IRB Jawa Tengah yang masih mencapai nilai IRB 99,81 (sedang). Penurunan IRB Wonosobo ini didukung dengan upaya peningkatan kapasitas daerah yang tercermin dengan indeks ketahanan daerah. Ketahanan daerah terhadap bencana didekati dengan mengukur kapasitas pencegahan, kapasitas kesiapsiagaan, kapasitas penanggulangan dan kapasitas pemulihan. Kabupaten Wonosobo memiliki nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 sebesar 0,9 (tinggi) artinya Kabupaten Wonosobo memiliki kapasitas yang kuat dalam menghadapi, menanggulangi maupun melakukan pemulihan dari bencana. Ketahanan daerah ini tentunya tercipta dari kelembagaan terhadap penanganan bencana dari pemerintah dan masyarakat yang tangguh bencana. Namun demikian, masih terbatasnya penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana. Tahun 2025 sebesar 55,11% penduduk (43.642 jiwa) yang mendapatkan informasi potensi bencana dari total masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana 79.187 orang.

## 2. Isu Strategis

Tema RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 adalah **“Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan”**. Selaras dengan tema tersebut dan memperhatikan gambaran kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan provinsi, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2027 sebagai berikut :

### 1) Agrobisnis dan Pariwisata yang Berdaya Saing

Sektor agrobisnis mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Agrobisnis yang unggul perlu didukung dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Perkembangan sektor agrobisnis selanjutnya dipacu oleh kemajuan riset dan teknologi. Riset diperlukan untuk menemukan ilmu, pengetahuan dan inovasi bagi petani sehingga para petani dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya murah dan produktivitas yang tinggi dan dampaknya pendapatannya akan meningkat. Proses pengolahan hasil-hasil pertanian untuk berbagai keperluan membutuhkan teknologi yang semakin canggih dan skala yang besar agar ekonomis, maka kegiatan ini pun didominasi oleh sektor industri pengolahan. Melalui proses pengolahan, produk-produk pertanian menjadi lebih beragam

penggunaan dan pemasarannya pun menjadi lebih mudah sehingga dapat diekspor.

Ruang lingkup agrobisnis yang mencakup semua kegiatan pertanian yang dimulai dengan pengadaan penyaluran sarana produksi, produksi usaha tani dan pemasaran produk usaha tani ataupun olahannya. Ketiga kegiatan ini mempunyai hubungan yang erat, sehingga gangguan pada salah satu kegiatan akan berpengaruh terhadap kelancaran seluruh kegiatan dalam bisnis. Karenanya agrobisnis digambarkan sebagai satu sistem yang terdiri dari 3 (tiga) subsistem, serta tambahan 1 (satu) subsistem lembaga penunjang. Untuk menjaga keberlangsungan pertanian ramah lingkungan perlu ditetapkan dengan regulasi.

Akses pasar dan fasilitasi kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam rantai bisnis pertanian, baik dalam satu kabupaten, antar kabupaten, maupun di tingkat nasional, perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah. Fasilitas pemerintah yang minim dalam sektor pertanian harus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Regenerasi petani perlu diperhatikan melalui berbagai upaya di antaranya transformasi pendidikan vokasi pertanian, inisiasi program beasiswa wirausaha muda pertanian, penerapan modernisasi pertanian, melaksanakan program pelatihan atau magang bagi petani muda, pemberian insentif bagi generasi muda yang terjun di dunia pertanian.

Bergeraknya sektor produktif pertanian diharapkan memiliki efek berantai dalam meningkatkan produksi dan produktivitas, memberikan kontribusi terhadap pemantapan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan importasi pangan. Ketergantungan yang terlalu besar pada impor pangan pokok sangat rentan terhadap kerawanan pangan, akibat produksi pangan dunia yang mengalami gangguan iklim, atau gangguan terhadap arus perdagangan pangan dunia. Kemandirian pangan sangat dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Ketahanan pangan terdiri dari 3 (tiga) pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi, dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan dan peningkatan keterampilan SDM pertanian. Keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjangkau. Pemanfaatan pangan dipengaruhi pendidikan dan keterampilan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak, akan sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi.

Tantangan ketahanan pangan semakin kompleks: perubahan iklim, krisis ekonomi global, konflik, serta degradasi lingkungan hingga terganggunya rantai pasok pangan internasional merupakan beberapa hal penyebab terjadinya kerawanan pangan dan gizi. Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) juga merupakan salah satu indikator poin ini, memiliki keterkaitan dengan risiko kejadian stunting. Pariwisata secara nyata berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah seperti (1) pemicu investasi, (2) peningkatan pendapatan daerah, (3) penyediaan dan penciptaan lahan pekerjaan, (4) pembangunan dan perbaikan infrastruktur baik untuk *host* maupun *tourist* dan (5) pemicu pembangunan perekonomian lokal.

Pengembangan pariwisata ke depan perlu mengacu pada isu kepariwisataan yang disepakati dalam *Global Tourism Forum (GTF) 2022* yaitu: (1) pemulihan pasca pandemi, (2) pariwisata berkelanjutan, (3) mengembalikan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, (4) pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa, (5) membangun *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)* dan perjalanan untuk bisnis, (6) transformasi digital, model investasi baru dalam pariwisata dan (7) membangun kembali ekosistem pariwisata pasca-pandemi.

Sektor pariwisata memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga pertumbuhan sektor pariwisata, sosial ekonomi dan ekologi. Agar lebih optimal menghasilkan manfaat sektor ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu konsep yang memadukan pariwisata dan pertanian yang berkelanjutan yang diwujudkan dalam *agroecoculture tourism*. Dampak dari sektor pariwisata juga harus diperhatikan dan merupakan tantangan sehingga diantisipasi dengan regulasi terkait kepariwisataan.

Infrastruktur dasar dan pendukung serta sarana prasarana secara bertahap perlu ditingkatkan agar simpul-simpul destinasi pariwisata dapat terhubung dengan baik. Peningkatan konektivitas antar simpul pariwisata juga diharapkan dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi penunjang, seperti industri makanan olahan hasil pertanian dan sektor tersier atau jasa yang terkait dengan pariwisata.

Tata kelola pariwisata juga belum optimal. Pelaku usaha pariwisata muda perlu diciptakan untuk mengembangkan digitalisasi pariwisata di Kabupaten Wonosobo, digitalisasi informasi pariwisata penting agar informasi dapat tersedia, terbarukan dan mudah diakses.

Kerja sama dan kontribusi dari pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta menjadi kunci. Regulasi dan kebijakan pengelolaan destinasi perlu diintegrasikan dan ditegakkan dengan konsisten. Daya tarik destinasi wisata perlu dikembangkan dengan integrasi antar destinasi wisata, pengemasan produk wisata secara tematik dan menarik, pengembangan atraksi wisata baik wisata alam, budaya maupun kuliner. Inovasi dalam mendorong elemen pemerintah desa dan perusahaan untuk mendukung inisiatif desa wisata

sangat diperlukan. Kelompok UMKM yang bergerak dalam ekonomi kreatif juga perlu ditingkatkan pemberdayaannya untuk menciptakan nilai tambah dalam industri pariwisata.

Dengan perbaikan dalam aspek-aspek ini, Wonosobo dapat mengoptimalkan potensi pariwisata dan mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat setempat.

## **2) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Permasalahan kemiskinan di Wonosobo tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian besar penduduk miskin bekerja sebagai buruh tani (tidak memiliki lahan) dan petani gurem (memiliki lahan tapi sempit) dengan produktivitas yang rendah. Angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2025 masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Jawa Tengah. Angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 sebesar 13,34% sedangkan rata-rata Provinsi Jateng sebesar 9,48%. Meskipun penurunan angka kemiskinan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja terbaik dibandingkan kabupaten/kota di Jawa Tengah, namun jika melihat tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan, Kabupaten Wonosobo memerlukan upaya yang lebih mengingat rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin di Kabupaten Wonosobo masih jauh dari garis kemiskinan. Dengan kondisi ini maka intervensi bantuan sosial saja tidak cukup untuk mengangkat mereka keluar dari zona kemiskinan secara permanen.

Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih menjadi prioritas utama pembangunan daerah yang membutuhkan pendekatan integratif. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya pengeluaran per kapita, melainkan pemenuhan hak-hak dasar dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi. Meskipun tren angka kemiskinan menunjukkan penurunan, posisinya yang masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah menjadikan penanganan kemiskinan sebagai prioritas. Kemiskinan di Wonosobo memiliki karakteristik di mana kantong-kantong kemiskinan terkonsentrasi di wilayah perdesaan yang sulit dijangkau secara geografis sehingga percepatan upaya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar menjadi penting untuk memperkecil kesenjangan desa- kota dan membuka peluang ekonomi yang lebih tinggi. Mengurangi beban pengeluaran masih menjadi isu penting untuk memamatkan penduduk miskin terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat miskin dapat mengalokasikan sumber daya ekonominya yang terbatas untuk kebutuhan gizi dan produktivitas. Tata Kelola Data adalah salah satu hambatan utama dalam penanggulangan kemiskinan selama ini yang menyebabkan inefisiensi akibat data yang tidak akurat (*exclusion and inclusion error*).

Isu strategis pertama adalah perlindungan sosial yang adaptif terhadap inflasi dan bencana. Garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh

komponen pengeluaran makanan sehingga saat terjadi kenaikan harga pangan pokok akibat inflasi global atau krisis pangan, jumlah penduduk miskin di Wonosobo berisiko meningkat pesat. Oleh karena itu, isu strategisnya adalah bagaimana membangun sistem perlindungan sosial yang mampu merespons guncangan ekonomi secara cepat, melalui bantuan sosial yang tepat sasaran dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok di pasar lokal.

Isu kedua berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi inklusif yang mampu membuka lapangan kerja baru bagi warga miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga tani mengingat sebagian besar penduduk miskin Wonosobo adalah petani gurem (petani pemilik lahan sangat sempit/ kurang dari 0,5 ha) dan pekerja bebas pertanian.

Isu ketiga adalah penguatan kemandirian desa dan optimalisasi peran BUMDes dan Lembaga ekonomi desa seperti koperasi desa merah putih. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek utama dalam pengentasan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa perlu diarahkan secara lebih spesifik pada kegiatan produktif dan penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung ekonomi lokal. Mewujudkan kemandirian desa juga tidak bisa berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dan Kerjasama antar desa mengingat rata-rata desa yang berdekatan cenderung memiliki potensi dan permasalahan yang hampir sama. Penguatan Kerjasama antar desa dalam rangka pengembangan kawasan menjadi isu strategis untuk menjawab permasalahan kemiskinan di tingkat desa.

Isu keempat adalah penguatan data sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT SEN) sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Sosial dan Ekonomi Nasional. DT SEN memadukan berbagai macam jenis data yang selama ini digunakan oleh Kementerian atau Lembaga seperti P3KE, DTKS dan Regsosek. Peran desa dan kelurahan menjadi penting dalam rangka memastikan updating data kesejahteraan di wilayahnya masing-masing. Optimalisasi penggunaan DT SEN ini harapannya menjadikan bantuan menjadi lebih tepat sasaran serta mengurangi inefisiensi bantuan.

### **3) Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Adaptif**

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tugas penting bagi daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi pada akuntabilitas, efisiensi, inovasi dan kemandirian daerah. Tata kelola pemerintahan ke depan diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan *agile* yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan kolaborasi antarsektor.

Berkaitan dengan implementasi reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan

reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kabupaten Wonosobo harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perencanaan dan penganggaran daerah perlu menyeimbangkan dan menyelaraskan pendekatan *top-down*, *bottom-up*, teknokratis, politis dan partisipatif dengan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Kemandirian daerah menjadi faktor penting untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kedepan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.

Terkait dengan efisiensi dan inovasi maka perlu didorong untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dengan menyederhanakan proses birokrasi termasuk di dalamnya integrasi antarsistem. Selain itu perlu mengadopsi teknologi seperti *Internet Of Thing (IoT)* untuk mengelola proses bisnis pemerintahan, big data untuk membantu mengambil kebijakan dan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligent*) untuk mempercepat proses pada sektor-sektor yang sudah didukung teknologi ini.

Terkait sumber daya manusia dibutuhkan perbaikan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang mendukung visi misi pembangunan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan efektif efisien melalui implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik dapat mendorong terbangunnya *smart government*.

#### **4) Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur yang Andal Menuju Kabupaten Layak Huni**

Pengembangan wilayah merupakan salah satu upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan wilayah memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk tujuan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan infrastruktur diperlukan dalam pengembangan wilayah. Pengembangan infrastruktur memiliki peran yang sangat strategis dalam kemajuan ekonomi daerah sehingga harus memadai. Secara umum, kondisi infrastruktur dan pengembangan kewilayahan di Kabupaten Wonosobo masih terdapat ketimpangan/disparitas antarwilayah kecamatan terutama di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan.

Tingkat perkembangan wilayah salah satunya ditentukan oleh kondisi infrastruktur terutama yang mendukung konektivitas intra dan antarwilayah. Infrastruktur harus dibangun secara terpadu dan terencana agar dapat berkelanjutan juga berketahanan terhadap risiko bencana mengingat seringnya terjadi bencana alam. Dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045, untuk 5 (lima) tahunan pertama periode 2025-2029 arah kebijakan dititikberatkan pada penguatan landasan transformasi agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan. Terkait dengan infrastruktur wilayah, arah kebijakan ini merujuk pada peningkatan akses, ketersediaan dan keberlanjutan infrastruktur yang inklusif. Inklusif artinya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Infrastruktur wilayah di Kabupaten Wonosobo diarahkan pada sektor jalan, air minum, sanitasi, perhubungan, perumahan dan permukiman. Ketersediaan infrastruktur terutama jalan sangat penting karena mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Apabila dilihat dari capaian kemantapan jalan di Kabupaten Wonosobo masih tergolong rendah karena tingkat kondisi jalan yang baik juga rendah salah satunya dipengaruhi oleh topografi wilayah yang berada di daerah rawan longsor dan gerakan tanah. Sarana dan prasarana perlengkapan jalan seperti alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, marka jalan, *guardrail* dan cermin cembung juga perlu dipenuhi untuk mendukung jalan yang berkeselamatan. Kualitas layanan transportasi masih belum optimal begitu pun dengan keselamatan jalan sehingga dapat mempengaruhi aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah (desa dan kecamatan).

Infrastruktur lainnya yaitu jaringan irigasi. Kualitas jaringan irigasi juga masih menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa ditingkatkan karena hal ini berpengaruh terhadap pengembangan pertanian. Kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik masih belum optimal.

Sarana prasarana berupa penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik masih perlu diperhatikan. Capaian layanan air minum di Kabupaten Wonosobo sudah tinggi tetapi masih terdapat wilayah yang belum mendapatkan layanan akses air minum padahal ini merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Selain itu, kesulitan dalam mendapatkan air minum juga terjadi di beberapa lokasi di saat musim kemarau. Kontinuitas aliran air minum selama periode tertentu masih terhenti akibat terganggunya suplai air baku. Sementara itu untuk akses layanan air limbah domestik masih rendah yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Pemicuan untuk meningkatkan akses air limbah domestik layak bagi masyarakat masih menjadi prioritas. Penyediaan air minum layak, sanitasi layak, ketahanan bangunan, serta kecukupan ruang menjadi indikator rumah yang di anggap layak huni serta berkelanjutan.

Koordinasi lintas sektor menjadi tantangan untuk mewujudkan infrastruktur yang andal dan menjadikan Kabupaten Wonosobo

Kabupaten yang layak huni. Banyaknya indikator untuk mengintegrasikan pembangunan menjadi hal yang perlu diperhatikan supaya pengelolaan infrastruktur menjadi lebih merata dan inklusif.

#### **5) Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Pertumbuhan ekonomi tanpa transformasi SDM hanya akan melahirkan ketimpangan. Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia mengidentifikasi bahwa daya saing SDM Wonosobo perlu ditingkatkan melalui intervensi di sektor pendidikan dan kesehatan. Transformasi ini merupakan penggerak utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut, Wonosobo menghadapi tantangan dalam penyediaan lapangan kerja berkualitas. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, di mana rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2025 hanya mencapai 6,91 tahun. Dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, RLS di Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori rendah. Bahkan harapan lama sekolah yang telah mencapai 12,05 menjadi HLS terendah di Jawa Tengah. Angka ini menunjukkan sebuah hambatan signifikan bagi transformasi ekonomi menuju sektor formal yang memiliki nilai tambah lebih tinggi membutuhkan pendekatan integratif lintas sektor karena banyak dimensi yang mempengaruhi pencapaian angka tersebut.

Maka isu strategis pada pembangunan SDM sektor pendidikan adalah penguatan sistem pendidikan, percepatan pemerataan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk memperkecil resiko bertambahnya kasus ATS dan rentan tidak melanjutkan dengan penanganan secara terpadu, dari level desa sampai ke level kabupaten dan lintas sektoral, penguatan kurikulum muatan lokal yang berfokus pada kewirausahaan pertanian dan manajemen pariwisata untuk mencetak petani milenial dan pelaku wisata yang profesional serta peningkatan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi adalah fondasi keterampilan dasar yang memungkinkan seseorang memahami dan menggunakan informasi, pemahaman dan penerapan konsep angka yang berguna pada pengambilan keputusan sehari-hari dan kesiapan kerja. Meningkatkan literasi masyarakat juga merupakan isu penting sebagai investasi jangka panjang yang memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mempercepat pembangunan inklusif. Gerakan literasi yang terkoordinasi antara pemerintah, sekolah, dan komunitas dapat mengubah informasi menjadi kekuatan untuk kemajuan. Memperkuat pendidikan bukan sekadar memperluas akses melainkan meningkatkan relevansi, mutu, dan inklusivitas sistem pendidikan

Pada sektor kesehatan, Usia Harapan Hidup pada tahun 2025 masih pada posisi tertinggal dibandingkan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meskipun setiap tahun terjadi kenaikan yang signifikan, dengan UHH sebesar 74,56 tahun masih jauh di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang telah mencapai 75,24. Pembangunan Kesehatan

masih di menghadapi tantangan ganda berupa penyakit menular (seperti TBC) dan HIV/Aids, penyakit tidak menular serta masalah gizi kronis seperti stunting. Penanganan stunting ditempatkan sebagai isu lintas sektor yang sangat strategis dengan dilakukan secara holistik mengintegrasikan intervensi gizi spesifik (oleh sektor kesehatan) dan intervensi gizi sensitif dan ketahanan pangan keluarga. Keberhasilan penurunan stunting diharapkan akan meningkatkan kualitas generasi masa depan Wonosobo, sehingga mampu berkompetisi secara global di masa depan. Dengan fenomena pergeseran dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular yang membutuhkan penanganan segera dengan tingkat komplikasi yang tinggi, maka peningkatan layanan rujukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan tingkat lanjut menjadi isu strategis kedepan.

Fokus strategi ke depan tidak lagi hanya pada aspek kuratif (pengobatan), tetapi pada preventif dan promotif dengan mendekatkan akses layanan kesehatan berkualitas hingga ke level desa dan keluarga. Disamping itu percepatan pemenuhan target *Universal Health Coverage* (UHC) juga menjadi isu penting untuk memastikan semua penduduk dapat mengakses layanan Kesehatan tanpa terbebani biaya tinggi. Angka kematian ibu dan bayi sebagai cerminan indikator akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga terlatih dan fasilitas rujukan. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang melalui keluarga yang lebih sehat dan masyarakat yang lebih produktif. Pembangunan kesehatan yang efektif harus menempatkan kesehatan reproduksi dan KB sebagai komponen inti karena keduanya berkontribusi langsung pada penurunan kematian ibu dan bayi, peningkatan kualitas hidup keluarga, dan penguatan sumber daya manusia. Pemenuhan infrastruktur dan perbaikan sistem Kesehatan bukan hanya peningkatan harapan hidup saja melainkan investasi ekonomi jangka panjang. Dengan masyarakat yang sehat, beban biaya pengobatan dapat dikurangi, dan waktu yang dihabiskan untuk bekerja menjadi lebih produktif, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2024 sebesar 52,44 yang telah naik dibandingkan tahun sebelumnya masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Dalam hal pembangunan kepemudaan, kesenjangan antara kemampuan pemuda dan kebutuhan pasar kerja; angka pengangguran muda, putus sekolah, dan rendahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik menjadi hambatan nyata. Selain itu, perubahan teknologi dan ekonomi menuntut keterampilan baru yang belum merata diakses. Tanpa intervensi terarah, potensi demografis pemuda bisa menjadi beban, bukan keuntungan. Selain itu, peningkatan prestasi pemuda di bidang olahraga dan seni budaya juga perlu didorong sebagai bagian dari pembangunan karakter dan identitas lokal yang dapat mendukung industri kreatif pariwisata.

Kesetaraan Gender sebagai Pengungkit Kesejahteraan Perempuan di Wonosobo memegang peran kunci dalam sektor domestik dan ekonomi perdesaan. Namun, permasalahan gender seperti rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di sektor formal dan masih tingginya kasus kekerasan seringkali menghambat kontribusi perempuan dalam pembangunan. Isu strategis pengarusutamaan gender akan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan reproduksi, dan permodalan usaha. Keluarga dengan ibu yang teredukasi cenderung memiliki pola asuh yang lebih baik, kesehatan yang lebih terjaga, dan kemampuan mengelola keuangan rumah tangga yang lebih efektif.

Rendahnya tingkat pendidikan, prevalensi stunting, dan ketimpangan pendapatan merupakan hambatan utama yang harus dipecahkan melalui strategi yang holistik, integratif, tematik, dan spasial. Keberhasilan pencapaian target IPM pada tahun 2027 memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, hingga partisipasi aktif masyarakat desa. Peningkatan kualitas layanan dasar yang merata

Pembangunan Wonosobo bukan hanya tentang membangun gedung atau jalan, melainkan tentang membangun manusia yang berkualitas dan berdaya saing agar mereka mampu bersaing menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Kabupaten Wonosobo memiliki proporsi penduduk usia produktif yang sangat besar, namun, tanpa intervensi justru akan menjadi beban pembangunan. Transformasi ekonomi di sektor pariwisata dan agrobisnis menuntut SDM yang mampu melakukan percepatan adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi. Peningkatan kualitas SDM menuntut komitmen politik, investasi berkelanjutan, dan kolaborasi multisektoral.

## **6) Perekonomian Daerah yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

Pencapaian perekonomian daerah yang ditopang sektor unggulan yang produktif, berdaya saing menjadi isu penting, namun banyak kendala yang harus dihadapi. Keterbatasan sumber daya manusia di sektor pertanian terutama petani, lemahnya riset dan pemanfaatan teknologi pertanian, praktik pertanian monokultur dan penggunaan sarana produksi pertanian yang tidak ramah lingkungan masih berlanjut, lahan pertanian terus berkurang luasnya akibat pembangunan permukiman yang tidak patuh pada regulasi rencana tata ruang dan tata wilayah.

Sebagai upaya mewujudkan landasan yang kuat maka struktur perekonomian daerah harus bertransformasi dari ekonomi yang mengandalkan pada eksploitasi sumber daya alam menjadi perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi. Penerapan ekonomi sirkular bisa dijadikan sebagai alternatif yang akan memberikan keuntungan ekonomis, ekologis dan sosial. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, hilirisasi memiliki peran untuk

memperkuat sektor primer melalui sektor industri pengolahan sebagai penggerak perekonomian didukung sektor perdagangan yang berperan memperlancar arus barang dan jasa, mengusahakan dan menjaga tingkat harganya relatif stabil.

Sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan akan didorong pertumbuhannya oleh sektor pariwisata. Adanya wisatawan yang datang, berbagai produk lokal dapat dipromosikan dan dijual, meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha lokal. Masyarakat setempat juga perlu terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata, baik dalam hal pelestarian lingkungan dan budaya, maupun dalam penyediaan produk dan jasa (akomodasi, makan minum dan transportasi) yang berkualitas bagi wisatawan. Sementara itu, pelaku usaha pariwisata perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan demi menjaga daya tarik destinasi wisata.

#### **7) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Bencana**

Isu strategis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, rendah karbon, berketahanan iklim dan bencana dipengaruhi oleh isu global perubahan iklim; isu nasional berupa ketahanan ekologi serta isu Provinsi Jawa Tengah terkait Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.

Kondisi Kabupaten Wonosobo yang berada di wilayah hulu beberapa daerah aliran sungai (DAS) memiliki peran penting untuk keberlangsungan ekologi dan lingkungan baik di kawasan hulu, tengah dan hilir DAS. Kontrol terhadap lahan menjadi penting untuk mengatur kondisi tata ruang sesuai peruntukannya. Seperti letak hutan lindung, hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan permukiman, hingga kawasan kegiatan ekonomi. Sehingga, setiap aktivitas akan saling mendukung untuk keberlangsungan komponen lain serta terjadinya keseimbangan ekosistem yang berdampak terhadap kelestarian alam sekaligus pengurangan terhadap risiko bencana.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan terobosan upaya bersama. Salah satunya menggunakan energi baru terbarukan seperti konversi energi matahari, angin maupun air menjadi sumber energi. Penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya untuk meminimalisir terjadinya degradasi lahan serta pengelolaan sampah yang efisien agar tidak mencemari lingkungan baik air, udara dan tanah.

### **IV. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027**

Arah kebijakan tahun 2027 difokuskan pada tema pembangunan “**Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan**” dalam rangka mendukung pencapaian visi misi daerah melalui Program Unggulan Daerah yaitu “**Dalan Maer Rejeki Omber**”, “**UMKM Berdaya**”, “**Produk Lokal**

**Mengglobal”, “Muda Kreatif Kontributif”, “Sobo Asri Lestari Mbangun Desa Nata Kutha”, “Sobo Sehat, Bergas, Cerdas, Mentas”, “Praja Nglayani, Ngayomi, Ngayahi” dan “Sobo Harmoni Asri Lestari”.**

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut meliputi :

- 1) Peningkatan produktivitas pertanian ramah lingkungan berbasis sentra komoditas unggulan melalui mekanisasi pertanian;
- 2) Peningkatan hilirisasi produk pertanian dengan memanfaatkan inovasi teknologi industri pengolahan gula kelapa yang ramah lingkungan;
- 3) Peningkatan pemasaran digital pariwisata dan ekonomi kreatif pada kawasan pariwisata prioritas, kawasan pariwisata rintisan, Geopark Nasional Dieng untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Borobudur – Dataran Tinggi Dieng.

Tahun 2027 ini merupakan tahap **“Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut :

1. Transformasi perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif melalui :
  - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan berbasis sentra komoditas unggulan (padi, ubi kayu, kentang, kopi, kelapa, carica, salak, durian, biofarmaka, Domba Wonosobo dan benih ikan);
  - 2) Pengendalian dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  - 3) Intensifikasi pertanian untuk pengembangan budidaya pertanian ramah lingkungan;
  - 4) Peningkatan pengelolaan perbenihan berbasis masyarakat, melalui penguatan penangkar benih tanaman, penangkar bibit ternak, unit perbenihan rakyat;
  - 5) Pengembangan *smart farming* untuk menarik minat generasi muda;
  - 6) Transformasi pertanian ramah lingkungan berbasis sentra komoditas unggulan (ubi kayu dan kelapa) untuk mendukung ekonomi sirkular melalui penggunaan inovasi teknologi modern dan tepat guna;
  - 7) Pengembangan sentra ubi kayu, kelapa, domba Wonosobo dan sapi;
  - 8) Peningkatan kelembagaan petani berbasis korporasi;
  - 9) Peningkatan kapasitas petani/peternak/pembudidaya ikan dan regenerasi petani melalui sekolah lapang, magang, pelatihan;
  - 10) Peningkatan kemitraan *close loop* komoditas unggulan (ubi kayu);
  - 11) Penyusunan kerangka regulasi terkait modernisasi pertanian, peternakan, perikanan dan pangan;
  - 12) Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat melalui pembentukan lumbung pangan desa dan daerah;
  - 13) Peningkatan kemandirian pangan melalui penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;

- 14) Pengendalian harga pangan untuk menjamin keterjangkauan pangan melalui subsidi pangan murah, pemantauan stok pangan, penyederhanaan rantai distribusi harga pangan;
- 15) Peningkatan teknologi produksi, kualitas kemasan dan sertifikasi produk UMKM;
- 16) Pengembangan inkubator bisnis UMKM;
- 17) Kemudahan akses pembiayaan syariah untuk UMKM;
- 18) Peningkatan kualitas manajemen usaha dan kemitraan koperasi UMKM;
- 19) Fasilitasi program prioritas nasional Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP);
- 20) Peningkatan wirausaha muda;
- 21) Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pasar daerah;
- 22) Peningkatan tata kelola perdagangan dan sistem distribusi dan digitalisasi perdagangan;
- 23) Penguatan ketersediaan pasokan dan stabilitas pengendalian harga di tingkat produsen, distributor dan pasar;
- 24) Pengembangan ekonomi kreatif kriya dan seni rupa;
- 25) Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan wisata religi;
- 26) Penguatan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Wadaslintang dan sekitarnya pada DPK Lintang Winong dan sekitarnya serta pengembangan Geopark Nasional Dieng dan ekonomi kreatif unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng;
- 27) Pengembangan 6A (*Attraction* (Daya Tarik), *Activity* (Aktivitas), *Accessibility* (Aksesibilitas), *Accommodation* (Akomodasi), *Amenities* (Amenitas) dan *Ancillary* (Layanan Tambahan)) pariwisata untuk meningkatkan daya saing pariwisata.

2. Penurunan ketimpangan pendapatan melalui :

- 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sektor agrobisnis dan pariwisata;
- 2) Peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
- 3) Peningkatan akses lapangan kerja bagi kelompok rentan;
- 4) Peningkatan industri pengolahan pertanian berbasis sentra (ubi kayu dan kelapa);
- 5) Peningkatan sertifikasi mutu produk industri pengolahan;
- 6) Peningkatan kelembagaan dan kapasitas pelaku IKM;
- 7) Pengembangan sentra industri pengolahan kentang dan tembakau;
- 8) Kemudahan akses pembiayaan syariah untuk IKM;
- 9) Peningkatan investasi sektor riil.
- 10) Inisiasi investasi hijau yang memperhatikan lingkungan, ekonomi dan sosial.

3. Transformasi sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas melalui :

- 1) Transformasi sistem pembelajaran kelompok dewasa melalui penguatan kapasitas lembaga pelayanan dan tenaga pendidik;
- 2) Transformasi skala penuntasan anak tidak sekolah melalui integrasi dukungan sosial dan ekonomi keluarga;

- 3) Transformasi metode pembelajaran inovatif, terintegrasi dan adaptif yang mendukung peningkatan literasi dan numerasi ;
  - 4) Pengembangan kemitraan multipihak yang mendukung pendidikan kewirausahaan dan muatan lokal agrobisnis, pariwisata dan pengembangan Geopark Nasional Dieng;
  - 5) Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan;
  - 6) Transformasi layanan PAUD terintegrasi untuk memperluas jangkauan dan akses;
  - 7) Fasilitasi kerjasama pada sekolah kejuruan dan pendidikan vokasi untuk pemenuhan tenaga kerja terampil di sektor agrobisnis dan pariwisata;
  - 8) Transformasi fungsi perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat;
  - 9) Penguatan pembangunan kepemudaan yang mendukung prestasi dan kemandirian pemuda;
  - 10) Peningkatan prestasi dan pembinaan intensif cabang olahraga unggulan;
  - 11) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung prestasi olahraga dan kebugaran;
  - 12) Penguatan ketahanan gizi masyarakat dan pencegahan stunting secara berkelanjutan;
  - 13) Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di fasilitas kesehatan primer dan rujukan;
  - 14) Penguatan promosi dan cakupan deteksi dini penyakit berbasis pemberdayaan;
  - 15) Perluasan cakupan pengobatan dan temuan pada populasi kunci HIV/AIDS dan TBC;
  - 16) Pemerataan kualitas sarana, prasarana dan keterjangkauan layanan kesehatan serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan;
  - 17) Peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan;
  - 18) Transformasi sistem kesehatan daerah;
  - 19) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung usaha pariwisata prioritas serta mendukung pengembangan Geopark Nasional Dieng;
  - 20) Transformasi penguatan peran lembaga keluarga dan komunitas sebagai agen ketahanan keluarga;
  - 21) Transformasi layanan kesehatan reproduksi terintegrasi;
  - 22) Penguatan lembaga layanan rujukan kasus kekerasan;
  - 23) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak.
4. Peningkatan kesejahteraan sosial dan kemandirian sosial ekonomi melalui :
- 1) Transformasi sistem perlindungan sosial yang adaptif dan tata kelola data terpadu untuk ketepatan sasaran;
  - 2) Transformasi skema pemberdayaan masyarakat;
  - 3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan desa;
  - 4) Diversifikasi usaha lembaga ekonomi desa;
  - 5) Pengembangan kluster usaha antar desa dan kemitraan swasta dalam pembangunan kawasan perdesaan;

- 6) Pengembangan sistem informasi desa.
5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif melalui :
  - 1) Implementasi struktur kelembagaan perangkat daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berintegritas;
  - 2) Peningkatan kualitas kebijakan;
  - 3) Penguatan sistem akuntabilitas pemerintah daerah;
  - 4) Penguatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
  - 5) Peningkatan sistem pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - 6) Diversifikasi pendapatan dan peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
  - 7) Penguatan fungsi arsip sebagai sumber data dan informasi penting;
  - 8) Perluasan implementasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital;
  - 9) Implementasi dan penguatan regulasi untuk mendukung inovasi pelayanan publik;
  - 10) Replikasi praktik baik inovasi yang mendukung prioritas daerah;
  - 11) Penguatan statistik sektoral daerah sesuai prinsip satu data;
  - 12) Penguatan kerjasama daerah;
  - 13) Penguatan manajemen talenta aparatur berbasis sistem merit;
  - 14) Penguatan sistem kinerja ASN;
  - 15) Peningkatan literasi digital bagi SDM aparatur dan masyarakat;
  - 16) Penguatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
  - 17) Penguatan peran kecamatan dalam fungsi kewilayahan;
  - 18) Mendorong reforma agraria dan penyelesaian sengketa tanah;
  - 19) Peningkatan kualitas raperda inisiatif yang sesuai dengan prioritas daerah.
6. Peningkatan harmonisasi keberagaman melalui :
  - 1) Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim demokratis;
  - 2) Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
7. Transformasi infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan melalui :
  - 1) Modernisasi jaringan irigasi sekunder pada kawasan LP2B;
  - 2) Peningkatan jalan pada pembentuk koridor penghubung sentra produksi dan industri pengolahan hasil pertanian;
  - 3) Peningkatan jalan kabupaten di kawasan perbatasan/pinggiran yang berpotensi menjadi koridor distribusi hasil pertanian;
  - 4) Penerapan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk kawasan pariwisata strategis;
  - 5) Rintisan penyediaan sarana transportasi publik di kawasan wisata;
  - 6) Penanganan kumuh berbasis komunitas pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Wilayah Sungai Strategis Nasional;

- 7) Perluasan Akses Sarana Transportasi aman bagi Anak Sekolah;
  - 8) Penyediaan Air Baku Berkelanjutan dengan menerapkan sistem *zero run off*;
  - 9) Penataan *blokplan* perkantoran;
  - 10) Sinergi penataan ruang untuk menjaga keseimbangan antara budidaya dan kawasan lindung;
  - 11) Fasilitasi rumah tidak layak huni;
  - 12) Peningkatan cakupan air minum layak dan aman;
  - 13) Peningkatan uji kualitas air minum;
  - 14) Peningkatan cakupan sanitasi layak dan aman;
  - 15) Peningkatan cakupan layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal.
8. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui :
- 1) Fasilitasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT);
  - 2) Peningkatan pengelolaan persampahan pada sumbernya melalui optimalisasi, bank sampah, pembangunan/revitalisasi TPS3R/ Pusat Daur Ulang (PDU) atau sejenisnya;
  - 3) Peningkatan penanganan persampahan melalui TPST;
  - 4) Penerapan skema imbal jasa lingkungan;
  - 5) Penerapan insentif nonfiskal berbasis jasa lingkungan pada SubDAS kritis WP JAGATENGAH;
  - 6) Implementasi regulasi pengelolaan lingkungan hidup;
  - 7) Implementasi penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran terbuka;
  - 8) Peningkatan perlindungan mata air prioritas pada SubDAS Serijo.
9. Peningkatan upaya ketahanan iklim dan bencana melalui :
- 1) Penguatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada daerah prioritas rawan bencana dan pencegahan serta pelayanan kebakaran berbasis komunitas dan peningkatan sarana dan prasarana di Wilayah Pengembangan KERSO (Kecamatan Kertek dan Wonosobo), Wilayah Pengembangan JARANKEPIL (Kecamatan Kalikajar, Sapuran dan Kepil) dan Wilayah Pengembangan BAKALINTANG (Kecamatan Kalibawang, Kaliwiro dan Wadaslintang);
  - 2) Peningkatan fungsi dan peran sistem komando dalam penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran;
  - 3) Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan kebakaran pada lokasi destinasi pariwisata (penginapan/hotel dan lokasi pariwisata) dan obyek vital daerah (gedung pemerintahan pelayanan publik);
  - 4) Peningkatan keterlibatan berbagai sektor untuk pembiayaan penanggulangan bencana (swasta, organisasi masyarakat, lembaga zakat dan pemerintah) melalui koordinasi multisektor.
10. Pelestarian warisan budaya daerah melalui :
- 1) Pengembangan warisan budaya daerah dan cagar budaya yang mendukung ekonomi kreatif;
  - 2) Pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan warisan budaya;

3) Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan kebudayaan.

#### V. Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027

Sasaran pembangunan tahun 2027 diarahkan untuk mencapai indikator tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yaitu:

**Tabel Target Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027**

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target	
			2024	2026	2027
1	Angka Kemiskinan	%	15,28	14,14-13,69	13,33-12,96
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,63	71,58	72,88
3	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,284	0,268-0,253	0,264-0,245
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	2,41	2,30	2,26
5	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	85,39	86,00	86,25
6	Nilai SAKIP	Angka	67,04	68,66	69,25
7	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,52	4,60	4,65
8	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,73	6,80	6,85
9	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,36	80,30	80,80
10	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	27,19	32,00-33,00	37,00-38,00
11	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,57	5,20-5,50	5,60-5,90
12	Indeks Infrastruktur	Angka	56,49	59,63	62,23
13	Rasio Gini	Angka	0,334	0,332-0,328	0,330-0,328
14	Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB)	Angka	63,48	66,88	67,69
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	71,11	76,67	76,71
16	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	67,98	64,67-63,49	63,69-62,17
17	Indeks Kebudayaan Daerah	Angka	N/A	49,44	54,30

Bupati Wonosobo



AFIF NURHIDAYAT